

RAPAT EVALUASI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN TAHUN ANGGARAN 2019 DI PETENG KARUHEI II TAHUN 2020

Rapat yang dilaksanakan di ruang Peteng Karuhei II ini diikuti oleh semua Kepala Perangkat Daerah (PD) dan seluruh Camat pada Jumat tanggal 17 Januari Tahun 2020. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Ibu Dra. Hera Nugrahayu memimpin rapat evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan triwulan IV tahun anggaran 2019.

Dalam rapat ini semua kepala Perangkat Daerah diminta menyampaikan kendala yang dialami dalam menyerap anggaran, karena realisasi kegiatan di 2019 terbilang rendah.

Dari 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi serapan anggaran Kota Palangka Raya menempati urutan terendah. Realisasi keuangan 88,02 persen dan realisasi fisik 88,94 persen.

Rendahnya realisasi kinerja Perangkat Daerah ini bukan tanpa sebab. Contohnya Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya tidak berani melelang sejumlah kegiatan karena mepetnya waktu.

Alhasil, belanja langsung di Dinas Pendidikan cuma terealisasi 85,15 persen. Jhonson Gultom, Plt kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menyebut program BOS kinerja tidak bisa terserap, karena alokasi anggaran yang ada baru ada di pertengahan Desember 2019.

Berbeda dengan kasusnya di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Realisasi keuangan juga rendah. Cuma 85,05 persen. Tapi Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dr Andjar Hari Purnomo punya alasan.

Pada 2019 Dinas Pendidikan 'dijanjikan' akan dapat dana alokasi khusus (DAK) untuk membiayai program Jampersal. Namun kata Andjar, anggaran ini hingga akhir tahun 2019 tidak kunjung ada, sedangkan dalam posisi estimasi pendapatan di DPKAD sudah tercatat, sehingga mau tidak mau hal ini akan terbaca jika anggarannya belum terserap, padahal dananya tidak ada.

Kasus seperti ini juga dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Palangka Raya.

Pada tahun anggaran 2019 DP2KBP3A Kota Palangka Raya juga dijanjikan akan dapat dana DAK, namun realisasinya menurut Kepala DP2KBP3A Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan hingga Desember 2019 juga tidak ada.

Menyikapi kondisi ini Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu berpesan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus bisa meng-input program yang sekiranya bisa direalisasikan, sehingga progres serapan anggaran bisa maksimal.

Sekda berharap TAPD harus selektif dalam menganggarkan kegiatan. Kalau sekira tidak bisa dilaksanakan, tidak usah saja, karena dampaknya terhadap kinerja Perangkat Daerah pada akhirnya yang menentukan pelaksanaan kegiatan.

